

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI JAMBI

M. Zahari MS¹

Abstract

Economic growth has always been one indicator of improving the welfare of the population of a region or country. Regional development as an integral part of national development is essentially an effort to increase the capacity of regional growth so as to run the government well.

Local revenue is an important benchmark for determining the level of region capacity in implementing real autonomy and responsibility. In the local government's efforts to increase revenue can not be separated from efforts to boost economic growth. Areas that positive economic growth can boost local revenue.

This study aimed to analyze the influence of economic growth on local revenue in Jambi Province. Analyses were performed with a simple regression model. While the data used is the time series data for the period 2004 - 2013. The results of the analysis concludes that economic growth is significant and positive effect on local revenue in the province of Jambi.

Keywords : Autonomy, Economic Growth, Local Revenue

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang diproksi dari produk domestik regional bruto atas harga konstan (PDRB Riil) merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dari perspektif ini pemerintah daerah, perlu jeli dan terus-menerus melakukan terobosan dalam bidang ekonomi serta mencari dan menggali sumber-sumber pendanaan terutama yang berasal dari PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah (PMD) dan lain-lain penerimaan yang sah. Hal ini disebabkan selain faktor manusia pelaksana (SDM), faktor dana juga sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah. Terbatasnya dana yang dimiliki daerah tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera, yang letaknya sangat strategis yaitu berada di tengah pulau Sumatera, dilalui jalur lintas timur Sumatera dan lintas tengah-barat Sumatera. Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah sebesar 53.435

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Km² dan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 3.092.265 jiwa, dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 3.317.034 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang masih relatif jarang yaitu sekitar 66 jiwa/ Km².

Realisasi kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di provinsi Jambi tahun 2013 mencapai sebesar Rp.3,012 triliun yang terdiri dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 1,755 triliun, pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 938,9 miliar, selebihnya untuk belanja tak terduga dan transfer. Sementara penerimaan daerah berasal dari PAD sebesar Rp. 1,063 triliun, dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1,814 triliun, selebihnya berasal dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang berasal PAD dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Jambi masih relative rendah yaitu sebesar 35,29 persen. Hal ini berarti komposisi penerimaan daerah didominasi oleh penerimaan dari luar PAD atau dengan kata lain, masih besarnya ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu menuntut adanya kerja keras segenap aparatur Pemerintah Provinsi Jambi untuk berupaya meningkatkan penerimaan daerah terutama berasal dari sumber-sumber PAD terutama meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Dalam suatu kegiatan penelitian apabila tidak dibatasi permasalahannya tentu banyak sekali masalah-masalah yang terkandung didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini, sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Adapun yang menjadi objek permasalahannya adalah: 1) Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Provinsi. 2) Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. 3) Apakah Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh yang positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Provinsi. 2) Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Provinsi 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1) Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama. 2) Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai potensi pertumbuhan ekonomi dan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4) Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan

3. Pendapatan lain-lain yang sah
Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi, melalui upaya:
 1. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
 4. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang

dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut. PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto dapat dibedakan atas :

- a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2008). Menurut Prasetyo (2009), istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian

suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. (Boediono; 1999).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses

penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. (Susanti, dkk; 2000).

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Riil pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB Riil tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}) atas harga konstan pada tahun dasar yang ditetapkan.

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Riil) dengan PAD

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Saragih, 2003). Pendapat Saragih ini sejalan dengan Hakim Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan pendapat lain menyatakan, Desentralisasi juga memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi

(Lin & Liu (2000)).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang sering terpakai dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif dimana keduanya dapat digabungkan, dan jenis data yang terpakai dalam penelitian ini adalah penggabungan kedua jenis data tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah memanfaatkan sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi atau lembaga terkait antara lain; Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda dan Dispenda Provinsi Jambi. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data *time series* periode 14 tahun terakhir (2000 – 2013).

Metode Pengumpulan Data :

Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi. Adapun data yang dibutuhkan adalah :

1. Data PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 2000 – 2013.
2. Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 2000 – 2013.
3. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi selama periode tahun 2000 – 2013.

Model Analisis

Analisis data diawali dengan analisis deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian.

Analisis data bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis, yaitu:

$$PAD = f(PDRB \text{ Riil})$$

Jika model diatas ditransformasikan kembali, maka diperoleh model sebagai berikut:

$$\ln PAD = \ln \alpha + \alpha_1 \ln PDRB \text{ Riil}$$

Keterangan:

PDRB Riil = Pertumbuhan Ekonomi (diproxy dengan PDRB harga konstan)

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Ln = Logaritma Natural

α = Intercept/Konstanta

α_1 = Koefisien Regresi

Test of Goodness Fit

Koefisien determinasi (R-Square)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Rumus koefisien determinasi (R^2), menurut Agus Widarjono (2005) adalah:

$$R^2 = \frac{\sum (x_1 y)^2}{\sum x_1^2 \sum y^2}$$

Berdasarkan humus tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diterjemahkan menjadi :

R^2 = Koefisien determinasi

x_1 = Variabel pertumbuhan ekonomi

b_1 = Koefisien regresi

y = Variabel PAD

Uji t-Statistik

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mengetahui apakah koefisien regresi satu variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap independen lainnya konstan (*Ceteris Paribus*).

Uji t di rumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{se(\beta_1)} \sqrt{n-k-1}$$

Keterangan:

t = t hitung yang diperoleh

β_1 = Koefisien regresi

se = Simpangan baku

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel bebas

Nilai t di hitung selanjutnya di bandingkan dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ (0,05) akan dapat diperoleh hasil dengan kategori sebagai berikut : apabila t hitung > t tabel , H_0 di tolak dan menerima H_a , artinya variabel x berpengaruh

signifikan terhadap variabel y., dan apabila t hitung < t tabel, H_0 diterima dan menolak H_a , artinya variabel x tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB

PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku tiap tahun menunjukkan perkembangan yang terus mengalami peningkatan. Pada tabel 4.1 tergambar, tahun 2004 jumlah PDRB sebesar Rp. 18,487,944 juta dan tahun 2013 menjadi sebesar Rp.85,558,314 juta atau meningkat sebesar Rp. 34.557,76 miliar. Sektor yang paling besar menyumbang dalam pembentukan PDRB ADHB Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, pada tahun 2009 sebesar 12.113,08 miliar, diikuti sektor sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 8.078,60 miliar.

Sedangkan sektor yang paling kecil kontribusinya adalah listrik, gas dan air bersih yaitu hanya sebesar Rp 368, 04 miliar.

Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004-2013 (Dengan Migas)

Tahun	PDRB ADHB (9 Sektor)		PDRB ADHK Tahun 2000	
	(Rp.Juta)	Pert (%)	(Rp.Juta)	Pert (%)
2004	18,487,944	-	11,953,885	-
2005	22,487,011	21.63	12,619,972	5.57
2006	26,061,774	15.90	13,363,621	5.89
2007	32,076,677	23.08	14,275,161	6.82
2008	41,056,484	27.99	15,297,771	7.16
2009	44,127,005	7.48	16,272,259	6.39
2010	51,219,999	16.07	17,465,237	7.35
2011	63,409,981	23.80	18,963,518	8.54
2012	72,634,074	14.55	20,373,533	7.44
2013	85,558,314	17.79	21,979,277	7.88
	Rerata	18.70		7.00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2004 – 2013

Berdasarkan PDRB atas harga berlaku pada 9 sektor ekonomi, selama kurun waktu 2004 – 2013 pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata tumbuh sebesar 18,70 persen pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 23,80 persen.

Dilihat dari PDRB atas harga konstan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama kurun waktu 2004 – 2013

mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 7,0 persen pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,54 persen.

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3, dapat diketahui perkembangan PDRB Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 4.2 Perkembangan PDRB AHB Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013

No	Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kerinci	2,652,262	3,064,103	3,517,814	4,014,870	4,648,576
2	Merangin	2,750,306	3,249,320	3,858,506	4,491,135	5,240,830
3	Sarolangun	3,249,678	3,795,188	4,667,127	5,380,165	6,432,168
4	Batang Hari	3,203,972	3,875,523	4,701,633	5,335,196	6,049,033
5	Muaro Jambi	3,539,903	4,144,343	4,721,757	5,537,607	6,494,475
6	Tanjab Timur	7,713,175	9,020,955	10,392,480	11,957,237	13,384,118
7	Tanjab Barat	5,634,608	6,727,156	7,848,491	9,001,585	10,388,993
8	Tebo	2,185,811	2,619,142	3,094,773	3,424,662	3,962,939
9	Bungo	3,325,762	4,033,989	4,755,294	5,446,199	6,198,777
10	Kota Jambi	7,821,183	9,107,396	10,566,477	12,360,519	14,628,701
11	Kota Sungai Penuh	1,289,337	1,518,387	1,737,794	1,997,070	2,308,571
	Provinsi Jambi	44,127,006	53,857,689	63,409,981	72,634,074	85,558,314

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2009 – 2013

Tabel 4.3 Rasio PDRB AHB Kabupaten/Kota terhadap PDRB AHB Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013 (%)

No	Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kerinci	6.01	5.69	5.55	5.53	5.43
2	Merangin	6.23	6.03	6.09	6.18	6.13
3	Sarolangun	7.36	7.05	7.36	7.41	7.52
4	Batang Hari	7.26	7.20	7.41	7.35	7.07
5	Muaro Jambi	8.02	7.69	7.45	7.62	7.59
6	Tanjab Timur	17.48	16.75	16.39	16.46	15.64
7	Tanjab Barat	12.77	12.49	12.38	12.39	12.14
8	Tebo	4.95	4.86	4.88	4.71	4.63
9	Bungo	7.54	7.49	7.50	7.50	7.25
10	Kota Jambi	17.72	16.91	16.66	17.02	17.10
11	Kota Sungai Penuh	2.92	2.82	2.74	2.75	2.70
	Provinsi Jambi	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2009 – 2013

Dilihat dari ratio, pada tahun 2013 Kota Jambi menduduki urutan pertama dalam pembentukan PDRB di Provinsi Jambi yaitu mencapai 17,10 persen, disusul Kabupaten Tanjab Timur sebesar 15,64 persen, dan Tanjab Barat 12,14 persen. Kabupaten/Kota yang paling rendah adalah Kota Sungai Penuh sebesar 2,70 persen.

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi tergambar dari kontribusi atau menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku pada suatu periode tahun tertentu.

Tabel 4.4 Kontribusi menurut Sektor Ekonomi terhadap PDRB ADHB di Provinsi Jambi Tahun 2000-2013 (Dalam %)

SEKTOR EKONOMI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	32.18	30.55	29.84	29.69	28.75	26.92	27.53	26.08	23.85	27.45	29.42	29.31	29.69	29.69
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	12.46	16.34	17.28	15.66	15.65	18.07	15.86	18.96	25.64	18.31	18.24	19.03	17.38	15.98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	14.72	14.27	13.82	12.73	12.41	12.02	11.94	11.86	11.13	11.92	11.11	10.64	10.91	10.68
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.57	0.59	0.74	0.98	1.03	0.97	1.01	0.90	0.80	0.83	0.90	0.94	0.92	0.96
5. BANGUNAN	2.14	2.02	2.58	3.31	3.93	4.36	4.56	4.59	4.32	4.86	4.54	4.35	4.93	5.70
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	16.82	16.38	15.92	15.35	15.08	15.29	16.37	14.88	13.76	14.57	14.53	14.94	15.78	16.98
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7.83	7.63	7.19	7.08	6.88	7.16	7.57	7.31	6.34	6.89	6.53	6.35	6.36	6.31
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PRSH.	3.81	3.23	3.17	3.80	4.26	3.99	3.90	4.25	4.40	5.17	5.18	5.14	5.16	5.22

9. JASA-JASA	9.48	8.99	9.47	11.40	12.01	11.22	11.26	11.16	9.77	10.00	9.54	9.30	8.86	8.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2000 – 2013

Secara keseluruhan, struktur perkonomian Provinsi Jambi selama periode 2000-2013 lebih dominan bercorak agraris. Walau kontribusi sektor menunjukkan penurunan di bandingkan dengan tahun 2000 namun sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian masih memberikan peran yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi Provinsi Jambi yaitu menyumbang sebesar 29,69 persen. Sub sektor Tanaman Perkebunan 177ember sumbangan tertinggi terhadap sektor ini yaitu pada tahun 2013 mencapai 16, 40 persen.

Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Jambi adalah Sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2013 berperan sebesar 16,98 persen dan sebagai penyumbang terbesar ke tiga dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan peranannya sebesar 15,98 persen di tahun 2013.

Sektor yang paling sedikit 177ember kontribusi dalam PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2013 adalah sektor Listrik, Gas dan air bersih, yaitu sebesar 0,96 persen, meski demikian sub sektor ini merupakan penunjang

sektor-sektor lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan cenderung fluktuasi. Selama kurun waktu dari tahun 2000 hingga tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 6,61 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,53 persen; kemudian tahun 2013 sebesar 7,88 persen; dan pada tahun 2012 sebesar 7,44 persen. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 5 persen.

Dilihat dari sektor-sektornya, pada tahun 2013 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi, dialami oleh sektor bangunan sebesar 20,73 persen; sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 12,24 persen; sektor listrik dan air bersih sebesar 9,27 persen; sedang terendah tumbuh adalah sektor pertambangan dan penggalian persen. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi per masing-masing sektor pada tahun 2001 - 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2001 – 2013 (dalam %)

SEKTOR EKONOMI	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rerata
1. PERTANIAN	3.71	4.85	3.56	5.08	4.61	11.34	4.57	5.72	6.66	5.21	6.01	7.60	7.41	5.87
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN	29.39	-1.52	2.82	0.65	1.04	-7.29	9.60	14.70	1.29	14.46	23.19	2.62	1.56	7.12
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.63	10.09	2.36	3.55	3.90	4.44	5.45	5.63	3.84	4.49	5.12	7.90	5.69	5.08
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6.04	16.05	22.10	13.03	5.10	7.38	4.47	7.28	9.27	13.12	11.50	6.37	9.27	10.08
5. BANGUNAN	1.66	33.98	26.79	25.75	20.48	6.67	14.58	10.28	8.45	6.76	6.31	16.16	20.73	15.28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.84	5.67	6.32	6.03	9.04	7.90	6.25	3.99	7.88	10.20	9.65	9.98	12.24	7.54
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8.10	5.36	4.94	6.47	7.10	5.94	7.14	3.37	5.81	4.11	4.02	7.27	8.52	6.01
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PRSH.	-8.93	3.13	13.98	14.38	8.42	5.77	19.06	23.88	17.85	12.12	9.08	7.81	7.88	10.34
9. JASA-JASA	4.42	9.67	4.82	3.48	3.21	4.07	5.62	4.99	6.24	4.05	3.80	3.85	4.80	4.85
PDRB dengan Migas	6.65	5.86	5.00	5.38	5.57	5.89	6.82	7.16	6.39	7.35	8.54	7.44	7.88	6.61
PDRB Tanpa Migas	3.47	6.19	5.55	6.48	6.25	8.35	6.58	7.37	6.99	6.84	6.93	8.69	8.59	6.79

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2001-2013

Dilihat dari tabel diatas, selama kurun waktu tahun 2001 – 2013 sektor-sektor ekonomi yang potensial menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, ada 3 sektor yang tumbuh rata-rata per tahun melebihi di atas 10 persen, yaitu sektor bangunan tumbuh rata-rata sebesar 15,28 persen, Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh rata-rata sebesar 10,34 persen, dan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh rata-rata sebesar 10,08

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013

No.	Daerah	2009	2010	2011	2012	2013	Rerata
1.	Kerinci	5.88	5.89	5.72	6.55	6.44	6.10
2.	Merangin	8.42	7.85	7.02	6.47	6.45	7.24
3.	Sarolangun	7.99	8.09	8.80	7.98	7.77	8.13
4.	Batang Hari	5.14	6.05	7.90	7.13	6.84	6.61
5.	Muaro Jambi	5.14	6.05	7.90	7.13	6.84	6.61
6.	Tanjung Jabung Timur	5.00	5.78	6.83	7.44	4.09	5.83
7.	Tanjung Jabung Barat	6.39	6.87	7.85	7.68	7.55	7.27
8.	Tebo	5.01	5.96	6.78	6.73	6.51	6.20
9.	Bungo	6.39	6.73	7.68	7.51	7.48	7.16
10.	Kota Jambi	6.47	6.66	6.97	7.05	7.76	6.98
11.	Kota Sungai Penuh	6.30	6.47	6.73	6.93	6.92	6.67
	Provinsi Jambi	6.39	7.35	8.54	7.44	7.88	7.52

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Indikator Ekonomi, Tahun 2009 – 2013

Secara rata-rata selama periode tahun 2009 – 2013 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun sebesar 8,13 persen pertahun, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 7,27 persen pertahun, dan Kabupaten Merangin sebesar 7,24 persen pertahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli

persen. Sedangkan sektor yang paling potensial adalah sektor jasa-jasa yang hanya tumbuh rata-rata per tahun sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2013 pertumbuhan yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 7,77 persen, menyusul Kota Jambi sebesar 7,76 persen, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 7,55 persen.

Daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Peningkatan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi

penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan Daerah.

Berdasarkan tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 15,97 persen dari tahun 2008. Selama periode 2004 – 2013 peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,04 pertahun.

Tabel 4.7 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi Jambi Tahun 2004-2013

Tahun	Realisasi PAD (Juta Rp)	Pert (%)
2004	287,638	
2005	344,881	19.90
2006	385,043	11.65
2007	451,051	17.14
2008	626,526	38.90
2009	526,442	(15.97)
2010	686,629	30.43
2011	984,233	43.34
2012	995,202	1.11
2013	1,063,810	6.89
Rata-rata		17.04

Sumber: DIPENDA Provinsi Jambi

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.8 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-714576.617	112581.972		-6.347	.000
PDRB_Riil	.083	.007	.974	12.221	.000

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$PAD = -714576.617 + 0.083 \text{ PDRB Riil}$$

(12.221)

Berdasarkan persamaan regresi yang telah di peroleh maka dapat dibuat suatu interpretasi terhadap model sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi, hal ini terlihat pada nilai koefisien PDRB Riil sebesar 0,083.

Terhadap PAD

Analisis Regresi Linier Sederhana

Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-masing variable yang dimaksud dalam penelitian ini, maka pada bagian ini akan dibahas hasil perhitungan empirik yang telah diolah dengan menggunakan perhitungan regresi melalui bantuan program SPSS Windows V.20. Tujuan dari perhitungan regresi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat signifikansi pengaruh antara variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Riil) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai PDRB atas harga konstan (AHK) dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi dengan tahun pengamatan 2004-2013. Data sekunder yang peroleh dari instansi terkait ini tidak langsung dimasukkan kedalam perhitungan, akan tetapi dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) dengan persamaan sebagai berikut : $\ln PAD = \ln \alpha + \alpha_1 \ln \text{PDRB Riil}$.

Setelah melakukan perhitungan dengan regresi dengan program SPSS Windows V.20, maka diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 4.8 berikut ini:

Artinya apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1%, akan menyebabkan kenaikan PAD sebesar 0,083% dengan asumsi variable lain konstan (*ceteris paribus*). Hal ini terjadi karena peningkatan PDRB mempunyai efek terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi. Sedangkan Nilai $\ln \alpha$ (konstanta) = -714576.617 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi pertumbuhan ekonomi akan dapat mengakibatkan PAD menurun sebesar 714576,617.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) dan Korelasi (R)

Determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel

terikat (dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (independen).

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai $R^2 = 0,949$ menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai jumlah PAD mampu dijelaskan oleh variasi perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi sebesar 94,9 persen sedangkan sisanya 5,1 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Tabel 4.9 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.949	.943	69095.599

a. Predictors: (Constant), PDRB_Riil

b. Dependent Variable: PAD

Sedangkan analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Nilai koefisien korelasi (R) = 0.974 berarti bahwa tingkat korelasi antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel PAD adalah sangat kuat dan arahnya positif. Hal ini ditandai dengan nilai R yang semakin mendekati 1.

Pengujian Hipotesis

Setelah mengetahui hubungan antara masing-masing variabel, maka selanjutnya akan dilakukan uji t untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka pengaruhnya adalah signifikan. Kalau yang terjadi adalah sebaliknya yaitu t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka pengaruh antara variabel tersebut tidak signifikan.

Berdasar tabel 4.8 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB Riil) sebesar 12,221. Untuk t_{tabel} dengan $df=8$ pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat keyakinan 95% diperoleh nilai sebesar 1.860. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah provinsi Jambi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan melalui PDRB atas harga konstan (PDRB Riil) menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dimana selama periode 2004-2013 dapat tumbuh sebesar 7 persen per tahun
2. Perkembangan Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi selama periode 2004-2013 cenderung mengalami peningkatan dimana rata-rata peningkatan mencapai 17,04 persen pertahun.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi

Saran

1. Pertumbuhan Ekonomi merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, harus terus ditingkatkan segi sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak sebagai bentuk balas jasa tidak langsung yang diberikan atas pajak yang dibayarkan tersebut.
2. Penerimaan PAD akan berhasil ditingkatkan jika melibatkan semua staholder yang ada di daerah untuk mencari solusi bersama yang

dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara konsisten dan proposional.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida., S. Alisyahbana, 2000, *Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Makalah* disampaikan pada kongres ISEI XIV, 21-23 April, di Makasar.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2004, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)*, beberapa terbitan, BPS Jambi. Jambi
- , 2014, *Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2014*, BPS Jambi. Jambi
- Budiono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis, Edisi 1, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L., 2000, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 2000, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan aplikasinya Di Indonesia)*, *Makalah Dalam Seminar Nasional*, Yogyakarta.
- , 2002, *Kebijakan, Implementasi, Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, *Makalah Dalam Seminar Nasional*, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2008. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika*, Ekonosia, Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Bandung: Ghali Indonesia.